

PROF. DORODJATUN KUNTJORO-JAKTI, PH.D EKONOM-DIPLOMAT YANG TAMPIL SAAT KRISIS

Pada tanggal 30 April 2018 telah dilaksanakan wawancara sejarah lisan terhadap Prof. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, Ph.D di studio wawancara sejarah lisan ANRI. Berikut ini rangkuman hasil wawancara sejarah lisan dengan beliau. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti merupakan salah satu ekonom terkemuka Indonesia. Pria yang dilahirkan di Rangkasbitung, Banten pada tanggal 25 November 1939 ini dalam darahnya mengalir *kebhinnekaan*. Ayahnya merupakan perpaduan Jawa-Madura, sedangkan ibunya perpaduan Sunda-Banten. Ayahnya memberi nama Dorodjatun karena terinspirasi nama kecil Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Sejak anak-anak Dorodjatun memperoleh pendidikan yang baik karena ayahnya seorang pejabat pemerintah kolonial.

Setelah lulus SMA Budi Utomo Dorodjatun melanjutkan kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI). Selama kuliah Dorodjatun menjadi anggota Dewan Mahasiswa UI dan aktif mengikuti berbagai kegiatan diskusi. Ketika mencapai jenjang sarjana muda, Dorodjatun dipercaya menjadi asisten dosen dari Prof. Daud Jusuf, Prof. Widjojo Nitisastro, Prof. Muhammad Sadli, serta Prof. J.B. Sumarlin. Selain itu, Dorodjatun juga pernah menjadi asisten peneliti bagi Prof. Ali Wardhana yang saat itu baru menamatkan studinya di Universitas Berkeley dan

diberi tugas oleh pemerintah untuk memperbaiki sistem perpajakan di Indonesia. Prof. Ali Wardhana pula yang mendorong Dorodjatun melanjutkan studi ke Universitas Berkeley di Amerika Serikat. Selama menempuh studi di Universitas Berkeley, Dorodjatun mempelajari *tax reform, budget*, dan ekonomi politik. Dalam pergaulan mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat, Dorodjatun dipercaya menjadi Wakil Ketua Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat (Permias).

Memilih Tetap Menjadi *Moral Force*

Pada tahun 1969 Dorodjatun pulang ke tanah air dan melanjutkan karirnya sebagai tenaga pengajar di UI. Meski menjadi pengajar di universitas negeri, namun Dorodjatun memilih tidak mau bergabung dengan Golkar dan tetap bersikap kritis terhadap pemerintah. Sikap kritisnya dituangkan dalam tulisan yang dimuat di berbagai surat kabar. Memasuki tahun

1970-an ketika investasi dari Jepang mulai masuk ke negara-negara di kawasan Asia. Dorodjatun dan para aktivis dari UI telah memperingatkan bahaya doktrin *Nippon in corporated* yang berpotensi menumbuhkan korupsi dan kolusi antara birokrat dan pengusaha. Pada waktu itu masyarakat Indonesia menyebutnya sebagai praktik percukongan. Puncak dari gerakan moral itu adalah meletusnya Peristiwa 15 Januari 1974 (Malari) di Jakarta. Pada waktu itu mahasiswa memprotes kedatangan Perdana Menteri Kakuei Tanaka di Jakarta. Akibat dari peristiwa itu beberapa aktivis UI diamankan oleh Kopkamtib, termasuk Dorodjatun. Dorodjatun kemudian ditahan di Rumah Tahanan Militer Budi Utomo bersama aktivis lainnya. Meski berada di dalam tahanan para aktivis tetap melakukan diskusi secara sembunyi-sembunyi. Setelah diinterogasi sebanyak 35 kali dan



Prof. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, Ph.D

ditahan selama 7 bulan, Dorodjatun dilepaskan begitu saja tanpa melalui proses hukum. Lepas dari tahanan Dorodjatun tetap bekerja sebagai tenaga pengajar di UI. Namun dampak dari penahanan itu Dorodjatun sempat beberapa tahun tidak dapat pergi keluar negeri karena *passport*-nya dicabut. Akibatnya kuliah S3-nya terhambat padahal tinggal menulis disertasi saja. Selain itu karirnya sebagai PNS dihambat dan tidak boleh menulis di media massa, serta tidak boleh menjadi pembicara di seminar-seminar.

Uniknya meski telah di-*blacklist* oleh pemerintah, namun Dorodjatun tetap membina hubungan baik dengan para pembantu dekat Presiden Soeharto, baik dari kalangan sipil maupun militer. Hal itu dimungkinkan karena Dorodjatun memiliki kompetensi yang baik di bidang ekonomi. Ternyata kedua hal itu yang membuatnya tetap dipakai di lingkungan pemerintahan.

Tampil di Saat Krisis

Pada tahun 1979, tiba-tiba Dorodjatun dihubungi oleh Prof. Emil Salim untuk menjadi anggota Tim Ekonomi Indonesia pada sebuah konferensi regional di Kualalumpur. Sejak saat itu Dorodjatun diperbolehkan bepergian keluar negeri dan dipakai sebagai tenaga ahli di berbagai lembaga pemerintah.

Pada tahun 1988, Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi Soesilo Soedarman memintanya untuk masuk menjadi anggota Badan Pertimbangan Telekomunikasi (Bapertel). Karena Bapertel berkedudukan di bawah presiden maka Dorodjatun juga melapor ke Presiden Soeharto. Pada pertemuan tersebut nampak sekali Presiden

Soeharto kurang menyukainya.

Ketika terjadi krisis karena harga minyak dunia merosot, Prof. Ali Wardhana memanggil Dorodjatun untuk memikirkan sumber pendapatan alternatif untuk mengisi devisa negara yang mulai menipis. Dorodjatun mengusulkan untuk menggenjot pendapatan negara dari sektor pariwisata karena Indonesia memiliki potensi besar, namun belum dikelola secara maksimal. Bersama-sama dengan Joop Ave yang saat itu menjabat sebagai Dirjen Pariwisata, Dorodjatun kemudian merancang berbagai kegiatan untuk mempromosikan pariwisata Indonesia ke luar negeri. Salah satu program yang besar adalah *Visit Indonesia Year 1991*. Pada saat sektor pariwisata tengah menggeliat, pada tahun 1993 terjadi kebakaran hebat terhadap hotel *Grand Inna Bali Beach* di Sanur. Kejadian itu merupakan pukulan telak bagi PT HI Natour sebuah BUMN yang mengelola hotel-hotel milik pemerintah. Saat itu PT HI Natour tengah dilanda krisis keuangan karena merugi Rp 25 miliar per tahun. Guna memulihkan kondisi keuangan dan menata kembali manajemen, pemerintah menunjuk Dorodjatun sebagai Komisaris Utama PT HI Natour. Dalam beberapa tahun menangani PT HI Natour, Dorodjatun berhasil memulihkan kondisi keuangan BUMN tersebut. Saat Dorodjatun berangkat ke Amerika Serikat sebagai duta besar, keuangan PT HI Natour telah surplus Rp 36 miliar.

Ketika pada tahun 1992 Presiden Soeharto terpilih sebagai Ketua Gerakan Non Blok maka perlu dibentuk sebuah badan yang membantu tugasnya. Dorodjatun kemudian diminta oleh Menteri Luar Negeri Ali Alatas untuk menjadi *senior*

expert untuk masalah ekonomi pada Badan Pelaksana Ketua Gerakan Non Blok (BPK-GNB). Selanjutnya pada tahun 1995, APEC mendirikan sebuah badan penasihat bisnis yang diberi nama *APEC Business Advisory Council* (ABAC). ABAC terdapat di masing-masing negara anggota APEC, kemudian Dorodjatun ditunjuk menjadi anggota ABAC dari Indonesia.

Memasuki semester kedua tahun 1997 beberapa negara di Asia mulai dilanda krisis ekonomi. Dalam sebuah rapat di Bina Graha, Dorodjatun yang mendalami masalah ekonomi politik diminta menjelaskan sebab akibat munculnya krisis ekonomi di Asia di hadapan Presiden Soeharto. Instruksi yang keluar dari Presiden Soeharto untuk para menteri, “siapa-siapa.” Satu bulan kemudian Dorodjatun diundang rapat di Bina Graha, pada kesempatan itu Kepala Bulog Bustanil Arifin menanyakan kepada Presiden Soeharto, “apakah ABAC akan kehilangan Dorodjatun untuk sebuah jabatan baru?” Jawaban Presiden Soeharto, “kalau yang bersangkutan bersedia.” Menyambut tawaran itu Dorodjatun hanya menjawab, “terima kasih Bapak Presiden.” Pada saat itu Dorodjatun tidak tahu jabatan apa yang akan dipercayakan kepadanya. Pada malam harinya, Menteri Luar Negeri Ali Alatas menelepon dari Kuba menjelaskan bahwa Dorodjatun ditunjuk menjadi Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat. Sebuah jabatan yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya, menjadi duta besar untuk sebuah negara *super power*. Pada bulan Februari 1998, Dorodjatun baru secara resmi dilantik oleh Presiden Soeharto sebagai duta besar untuk Amerika Serikat. Usai melantik Dorodjatun sebagai duta

PROFIL

besar, Presiden Soeharto memberikan instruksi lisan yang hingga saat ini isinya masih dirahasiakan oleh Dorodjatun. Saat Dorodjatun berangkat ke Amerika Serikat kurs US dollar terhadap rupiah telah mencapai Rp16.000, padahal ketika rapat pertama kali dengan Presiden Soeharto di Bina Graha baru mencapai Rp1.800. Saat menjadi duta besar, Dorodjatun pernah diminta bantuan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rahardi Ramelan untuk mencari bantuan pangan dalam bentuk apapun dari Amerika Serikat. Hal itu guna mengatasi kelangkaan bahan pangan di Indonesia. Dorodjatun berhasil memperoleh bantuan bahan pangan secara cuma-cuma sebesar 100.000 ton, namun harus diangkut dengan biaya dari pemerintah Indonesia. Jabatan sebagai duta besar diemban Dorodjatun hingga masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid.

Menata Perekonomian Indonesia

Ketika Presiden Megawati Soekarnoputri menyusun Kabinet Gotong Royong, Dorodjatun ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Pekerjaan besar yang harus dihadapi Dorodjatun adalah mengurangi dampak krisis 1997 yang masih terasa hingga tahun 2001. Apa yang terjadi di Indonesia saat itu, persis seperti yang dipelajari Dorodjatun saat mengambil S3 ekonomi politik di Universitas Berkeley. Pada saat itu Dorodjatun mempelajari negara-negara Amerika Latin yang perekonomiannya amburadul. Apa yang dipelajari Dorodjatun saat itu ternyata harus diterapkan di Indonesia beberapa tahun kemudian. Dalam mengatasi krisis itu Dorodjatun secara intens mewakili pemerintah dalam pertemuan dengan IMF untuk



Penyerahan secara simbolis arsip statis Prof. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti kepada Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, Mustari Irawan (14/11)

pencairan pinjaman luar negeri. Langkah-langkah lain yang ditempuh adalah penguatan pengawasan di bidang keuangan dengan membentuk KPK, PPATK, LPS, dan pembubaran BPPN.

Usaha keras Dorodjatun dalam mengatasi krisis ekonomi ternyata tidak seirama dengan kondisi keamanan dalam negeri. Pada masa itu terjadi tiga peristiwa terorisme besar yaitu bom Bali I, pemboman hotel J.W. Marriott, dan pemboman Kedutaan Besar Australia. Tiga peristiwa itu menjadi pukulan telak bagi sektor pariwisata Indonesia yang telah dibangun beberapa tahun sebelumnya.

Tetap Berkarya Meski di Luar Pemerintahan

Ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terpilih menggantikan Presiden Megawati Soekarnoputri, Dorodjatun diangkat sebagai *co chair Panel 45* bersama mantan Menteri Luar Negeri Ali Alatas untuk merumuskan

usulan tentang reformasi PBB. Dalam rumusan tersebut disampaikan gagasan untuk merubah struktur organisasi PBB agar lebih adil. Namun upaya itu tidak berhasil karena tidak didukung oleh negara-negara lain. Pada tahun 2006 – 2011, Dorodjatun diangkat sebagai anggota Dewan Pengarah Lemhanas oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Meski telah berada di luar pemerintahan, Dorodjatun tetap dipercaya memegang jabatan di berbagai perusahaan swasta, salah satunya menjadi Komisaris Utama BTPN. Kepercayaan itu menunjukkan bahwa kapasitas Dorodjatun memang sangat mumpuni di bidang perekonomian. Selain itu, Dorodjatun juga mempunyai kepedulian terhadap bidang kearsipan. Hal itu ditunjukkan dengan diserahkannya arsip pribadi miliknya secara resmi kepada ANRI pada tanggal 14 November 2018.

(Mudanto Pamungkas)